





























































sejarah politik Islam disebut "khalifah." Seorang kepala negara haruslah seorang yang mampu mengelola secara efektif persoalan-persoalan negara dan ia harus dipilih secara bebas oleh rakyat melalui lembaga permusyawaratan atau musyawarah. Seorang kepala negara merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Seorang kepala negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam urusan sipil, agama dan militer. Namun demikian seorang kepala negara tidak dapat berbuat otoriter dalam kekuasaannya, karena pada hakikatnya kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat melalui lembaga permusyawaratan yang dipimpin oleh ulama dan umara. Kekuasaan seorang kepala negara merupakan pengawasan tertinggi dan bimbingan terhadap pengamalan kehidupan beragama dalam masyarakat.

Dalam tatanan dan sistem politik luar negeri, sebuah negara demokratis dituntut untuk dapat bekerja sama dan menjalin hubungan baik dalam dunia internasional. Dan terciptanya tatanan politik yang damai serta persahabatan yang terjalin antara seluruh rakyat dan bangsa-bangsa di dunia merupakan makna yang terkandung di dalam ayat berikut ini :



























































